

Perbandingan Perilaku Kekuasaan beberapa Presiden Paska Soeharto

	BJ. Habibie	Abdurrahman Wahid	Megawati	SBY
Latar Belakang	Bekas Menteri di zaman Soeharto selama 4 periode Wapres RI	Pemimpin kharismatik NU	Ketua Umum PDIP	Kaster TNI zaman Soeharto dan BJ. Habibie
	Ketua ICMI	Mendirikan PKB	Korban 27 Juli 1996	Mantan Menkopolkan zaman Abdurrahman Wahid (mengundurkan diri)
	Ketua Dewan Penasehat Golkar	Tokoh pluralisme, kemanusiaan dan demokrasi di zaman Soeharto	Anak pemimpin kharismatik/Presiden RI 1 Soekarno	Mantan Menkopolkan zaman Megawati (mengundurkan diri)
Konteks Politik	Reformasi 1998	Pemilu multi partai	Skandal politik presiden versus parlemen	Pemilu langsung pertama
Dukungan Politik	Warisan konstitusional era Orde Baru	Pemilu paska Soeharto pertama dan didukung oleh koalisi parpol minoritas/Islam	keputusan Sidang Istimewa (SI) MPR	Pemilu Presiden langsung (60% suara)
Kebijakan Politik	(+)	(+)	(+)	(+)
	Masuknya agenda HAM secara khusus dalam tata kenegaraan (TAP MPR No. XVII/MPR/1998), RAN HAM 1999-2003, TAP MPR No. IV/MPR/1999)	masuknya agenda HAM dalam amandemen UUD 1945, Bab X A	Pilkada	Majelis Rakyat Papua (MRP)
	Kebebasan Pers (pencabutan SIUPP)	UU No. 39/1999 tentang HAM	Pemilihan presiden langsung	Perundingan damai Pemerintah RI - GAM di Helsinki
	Referendum Timor Timur	Perpu 1 th. 2000 tentang pengadilan HAM	perubahan susduk MPR	Pembentukan TPF kasus Munir

	Ratifikasi CAT dan CEARD	Pengadilan HAM (UU No. 26/2000)	Pengakuan hak dipilih mantan '65 dalam pemilu	Mengundang pelapor khusus PBB (UN Special Rapporteur) untuk pembela HAM dan menentang penyiksaan
	Penarikan pasukan dari Aceh	KPP HAM Tim-Tim	CoHA (RI dengan GAM)	Menjadi Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB
	Pembebasan Tapol/Napol	Jeda kemanusiaan	RAN HAM 2004-2009	Pembenahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
	Pencabutan UU Subversif	Pembebasan Tapol/Napol	UU No. 10/2004 tentang Tata Cara Pembuatan UU	Dihapuskannya pasal-pasal karet tentang penyebar kebencian
	UU Otonomi Daerah	UU 21/2001 mengenai Otsus Papua	UU No. 10/2004 tentang Tata Cara Pembuatan UU	Pengesahan Asean Charter
	(-)	(-)	(-)	(-)
	Keluarnya UU 45/1999 (Pemekaran Papua)		Darurat Militer dan Darurat Sipil Aceh	Memperpanjang Darurat Sipil dai Aceh
			Inpres No. 1/2003 pemekaran wilayah	Belum tuntasnya penyelesaian kasus kejahatan masa lampau di Aceh
			UU No. 18/2001 NAD	Belum ada dialog perdamaian untuk masyarakat Aceh
			Perpu Terorisme No. 1 dan 2	Pengampunan bagi Soeharto
			Penerapan hukuman mati	Dibatalkannya UU KKR
			pembentukan UU KRR	Pengesahan UU Pornografi

			Pemberhentian CoHA	Pemberlakuan Perda-Perda berbasis agama dan etnik
			Operasi intelijen di Poso	belum diratifikasinya ICC dan OPCAT
			UU No. 34/2004 tentang TNI	
			UU No. 27/2004 tentang KKR	
Pembenahan Institusional		(+)	(+)	(+)
	Multi partai	Pemisahan TNI dan Polr	Mahkamah Konstitusi (MK)	Pembentukan MRP
		Independensi Komnas HAM		Keharusan untuk membatasi/ menghapus bisnis militer sesuai UU No. 34/2004
		Kementerian HAM		Pembentukan Komisi Yudisial (KY)
				Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
		(-)	(-)	(-)
		Penambahan KODAM di Ambon	Penambahan KODAM Aceh	Posisi politik Wapres yang cukup tinggi
		Pelarangan militer aktif duduk di jabatan politik sipil negara	Mengizinkan lagi militer aktif duduk di jabatan sipil negara	Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan antara RI Timor Leste
		Penghapusan jatah posisi militer (untuk agenda 2004)		Pembentukan Bakorinda

				Belum terbentuknya lembaga Pengadilan HAM dan KKR di Aceh dan Papua
				Belum terbentuknya lembaga Pengadilan Militer
pelanggaran HAM Signifikan	Pelanggaran HAM di Timor Timur	kerusuhan Ambon	Pembunuhan Theys Hiyo Eluay	Kasus TPST Bojong
	Pembantaian Pesantren Tengku Bantaqiyah	Kerusuhan Sampit	Kekerasan di Aceh masih berlanjut	Kasus Puncak Jaya
	Peristiwa Simpang KKA	Kerusuhan Poso	Kekerasan di Poso masih berlanjut	Kasus Peledakan dan penembakan misterius bom di Poso dan Palu
	Kerusuhan Ambon	Bom natal	Kekerasan di Maluku berlanjut	Kasus penyiksaan atas nama terorisme
	Kerusuhan Sampit		Peristiwa UMI Makasar	Pemberlakuan hukuman mati (19 orang)
	Kerusuhan Poso		Peristiwa Bulukumba	Kriminalisasi dan stigmatisasi terhadap pembela HAM (petani, nelayan, pers, pelajar)
	Semanggi I		Kekerasan dan kriminalisasi media, petani, buruh dan HRD	Kasus kekerasan terhadap kelompok agama, kepercayaan dan etnis minoritas
	Semanggi II		Kriminalisasi aksi/demonstrasi	Kasus lumpur Lapindo
	Pembunuhan berantai dukun santet		Penyerangan KontraS dan entitas HRD lainnya	Kasus Alas Tlogo
			Pembunuhan Munir	Kasus-kasus sengketa agraria dan penggusuran

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM				(+)
	Pengadilan koneksitas kasus Tengku Bantaqiyah	Pengadilan HAM ad hoc kasus Timor Timur	Pengadilan militer kasus Theys Hiyo Eluay	Komnas HAM tengah menyelidiki peristiwa 1965 dan penembakan misterius (petrus)
				(-)
	pengadilan militer kasus Trisakti		Pengadilan koneksitas kasus 27 Juli 1996	Jaksa Agung menolak penyidikan untuk Trisakti, Semanggi I dan II, kasus Mei 1998, kasus penculikan, aktivis 1997/1998, kasus Wasior dan Wamena, kasus Talangsari 1989
			Pengadilan HAM ad hoc kasus Tanjung priok yang salahsatu putusannya adalah memberikan kompensasi kepada korban	Mahkamah Agung membebaskan pelaku pelanggaran HAM untuk kasus Tanjung Priok, Abepura dan Timor Timur
			mulai digelarnya Pengadilan HAM kasus Abepura	Mahkamah Agung menolak pemenuhan hak kompensasi dan rehabilitasi korban Tanjung Priok
			Putusan banding dan kasasi Pengadilan HAM ad hoc kasus Timor Timur	

			Pengadilan militer untuk kasus Semanggi II	
LPJ Politik	Laporan pertanggungjawaban ditolak oleh MPR terpilih hasil Pemilu 1999	Diturunkan melalui Sidang Istimewa MPR	Kalah dalam pemilu putaran kedua dari SBY	